
Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu)

Tria Maulia, Rifki Fathurrahman, Putri Cindy Claudia, Tumiar Sidauruk, M Taufik Rahmadi
Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Koresponden Author: triamaulia@gmail.com

Abstrak: Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dengan memberikan subsidi input berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk. Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi, yaitu tidak tersedianya pupuk bersubsidi tersebut pada awal musim tanam padi berlangsung. Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas usahatani padi. Sewaktu pupuk dibutuhkan biasanya akan sangat sulit untuk dicari sehingga hal ini menyebabkan harga pupuk di pasaran akan membumbung tinggi. Terkait berbagai permasalahan kelangkaan pupuk maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab dari kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi disebabkan oleh karena terjadinya ketidaksesuaian antara permintaan/usulan dari para petani terhadap pupuk bersubsidi dengan realisasi yang dilakukan atau diberikan oleh pihak pemerintah dan juga keterlambatan dari pendistribusian pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani.

Kata Kunci: Pupuk, Subsidi, Petani, Produksi, Teluk Mengkudu

Abstract: Fertilizer is a strategic means of production and plays an important role in increasing the productivity and production of agricultural commodities. The fertilizer subsidy policy is one of the fiscal policies that aims to support the agricultural sector, especially food crops by providing input subsidies in the form of setting the Highest Retail Price (HET) for fertilizers. However, in reality there are still some problems regarding the distribution of subsidized fertilizers, namely the unavailability of subsidized fertilizers at the beginning of the rice planting season. This will have an impact on the low level of productivity of rice farming. When fertilizer is needed, it is usually very difficult to find, so this causes fertilizer prices in the market to soar. Related to various problems of fertilizer scarcity, the purpose of this research is to determine the impact of the scarcity of subsidized fertilizers that occur and identify the factors that influence the scarcity of subsidized fertilizers. With data collection techniques through interviews, observation and literature study. The results showed that the cause of the scarcity of subsidized fertilizers that occurred was caused by a discrepancy between requests/proposals from farmers for subsidized fertilizers with the realization made or provided by the government and also delays in the distribution of subsidized fertilizers to the hands of farmers.

Keywords: Fertilizers, Subsidies, Farmers, Production, Noni Bay

PENDAHULUAN

Pertanian secara langsung memiliki sebuah peranan yang sentral dalam perekonomian, hal ini disebabkan karena dampaknya secara langsung terhadap kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia khususnya yaitu padi. Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu penyokong terbesar perekonomian Indonesia (Saputra & Eka Radiah, 2022). Masyarakat Indonesia sebagian besar mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, kebutuhan beras akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk (Gama et al., 2016). Pangan merupakan

kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang dalam setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi (Ramlayana et al., 2020). Kebutuhan akan makanan pokok ini di Indonesia tidak pernah menurun, melainkan kian meningkat. Dalam hal mencukupi akan kebutuhan pokok (pangan) yang terus meningkatkan tentunya dibutuhkan beberapa cara, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dari tanaman padi. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi padi adalah dengan pengembangan dalam bidang perbenihan (Rigi et al., 2019).

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan (Ahmad et al., 2019). Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional (Sakharina et al., 2021).

Berbagai kebijakan dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi padi secara nasional seperti penggunaan varietas unggul secara massal, pemberian subsidi pada berbagai input produksi, serta penerapan teknologi pertanian (Ayu et al., 2022). Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian (Indriasari & Sani, 2019). Pupuk juga berperan sebagai pemenuhan nutrisi tanaman yang dapat menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Kebutuhan akan pupuk semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya itu, harga pupuk yang kian melambung menjadikan petani kesulitan dalam menjalankan usahatani. Keberadaan kebijakan pupuk subsidi bagi petani merupakan angin segar. Pupuk subsidi sejauh ini sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuknya (Larasati et al., 2022). Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dengan memberikan subsidi input berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk (Noviandi et al., 2020).

PT Pupuk Indonesia adalah pelaksana Subsidi Pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kerjanya (Dalimunthe et al., 2021). Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani diatur oleh Pemerintah dengan melibatkan beberapa pihak dengan proses perpindahan produk yang dimulai dari Produsen, Gudang Penyangga, Distributor, dan Pengecer (4 tahapan) (Prasetyo & Usman, 2023). Pupuk bersubsidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan petani di sektor pertanian yang diatur melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (Sugiono & Gufroniah, 2022). Berdasarkan Permentan RI No 10 Tahun 2020 RDKK dapat dijelaskan sebagai alat yang digunakan untuk memesan pupuk bersubsidi kepada para kios tani penjual pupuk subsidi yang sah lewat cara manual dan/atau menggunakan sistem elektronik (Abdillah et al., 2022).

Namun dalam kenyatannya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi, yaitu tidak tersedianya pupuk bersubsidi tersebut pada awal musim tanam padi berlangsung. Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas usahatani padi (Maman et al., 2021). Sewaktu pupuk dibutuhkan biasanya akan sangat sulit untuk dicari sehingga hal ini menyebabkan harga pupuk di pasaran akan membumbung tinggi. Permasalahan lainnya yaitu akibat adanya konspirasi antar kepentingan yang mengutamakan keuntungan pribadi, para petani yang memakai pupuk melebihi dosis, serta pasokan input kebutuhan pabrik pupuk yang masih berkendala (Kautsar et al., 2020). Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usaha tani (Adiraputra, 2021). Mengingat pentingnya pupuk subsidi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam

pengawasan (Putu et al., 2021). Ruang lingkup pengawasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah 'enam tepat' pada subsidi pupuk yang merujuk pada tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga dan tepat waktu (Zulaiha et al., 2018).

Permasalahan mengenai pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh petani di Desa Pematang Setrak Dusun VIII, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kenyataannya, para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ketika masuknya musim tani, sehingga hal ini akan berdampak pada produktivitas padi yang akan menurun. Hal ini akhirnya memaksa para petani untuk membeli pupuk yang nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal, tentunya hal tersebut akan berdampak pada keterbatasan pembelian pupuk yang disebabkan keterbatasan modal yang dimiliki para petani. Adanya permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Desa Pematang Setrak Dusun VIII, Kecamatan Teluk Mengkudu, akan mempengaruhi produktivitas padi di daerah tersebut. Berdasarkan uraian penulis terkait berbagai permasalahan kelangkaan pupuk maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada di Dusun VIII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk, Kabupaten Serdang Bedagai. Populasi dalam penelitian adalah seluruh petani padi di lokasi penelitian, kemudian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang petani padi di lokasi tersebut. Dengan menggunakan variabel penelitian independen dan dependen. Adapun variabel independen pada penelitian ini yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi (X), dan variabel dependen atau yang mengakibatkan perubahan dari variabel bebas yaitu dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut (Y). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan data kualitatif yang baru. Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan pupuk bersubsidi sangat membantu petani dalam kegiatan usaha tani padi sawah karena, selain harganya terjangkau barangnya juga mudah untuk didapat. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi kepada petani padi sawah bukan merupakan masalah yang hanya sekali terjadi di Dusun VIII Desa Pematang Setrak ini, namun sudah sering terjadi bahkan di daerah atau desa lainnya. Kondisi ini yang pada akhirnya tentu akan berdampak terhadap produksi padi sawah petani karena dalam melakukan pemupukan harus selalu memperhatikan 5 tepat yaitu, tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, dan tepat bentuk, dimana dalam penggunaan pupuk bersubsidi hal tersebut yang harus memperhatikan untuk mencapai keefektifan dalam distribusi pupuk bersubsidi tersebut.

1. Tepat Dosis

Ketepatan dosis penggunaan pupuk merupakan hal yang diperhatikan petani dalam melakukan pada tanaman padi sawah. Ketepatan dosis tersebut dapat dilakukan oleh petani jika pupuknya tersedia, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa, selain kualitas dan kuantitas padi yang dihasilkan oleh petani. Faktor yang dapat menentukan terjadi peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para petani adalah ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat pengecer dan kelompok tani. Oleh karena itu dari penggunaan dosis pupuk yang mengalami tidak adanya ketepatan, maka akan berdampak terhadap penurunan produksi. Hal itu menjadi kendala bagi petani padi sawah dalam meraih keuntungan yang banyak.

2. Tepat Waktu

Ketidaktepatan penyaluran pupuk pada tingkat petani menyebabkan terlambatnya pemupukan padi oleh petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwasanya, sebagian petani di Dusun VIII Desa Pematang Setrak mengalami keterlambatan dalam pemupukan atau dalam kategori masih tidak tepatnya pemakaian pupuk oleh petani, hal ini dikarenakan keterlambatan proses penyaluran pupuk sampai ke tangan petani.

3. Tepat Jenis

Kesesuaian penggunaan jenis pupuk tertentu terhadap lahan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pemupukan. Seperti halnya yang terjadi Dusun VIII Desa Pematang Setrak mayoritas petaninya sudah melakukan ketepatan penggunaan jenis pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dari berbagai jenis pupuk, yang disubsidi adalah jenis pupuk Urea dan pupuk Phonska. Namun dikarenakan ketersediaannya terbatas pada tingkat petani sehingga para petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang tersedia di toko dengan harga yang mahal.

4. Tepat Cara

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua petani melakukan pengaplikasian pemupukan yang dilakukan sudah sangat tepat dan sesuai dengan ajuran pemakaian. Meskipun adanya kelangkaan pupuk yang terjadi tidak merubah tata cara pengaplikasian pupuk yang dilakukan petani.

5. Tepat Bentuk

Dari keseluruhan pupuk yang digunakan oleh petani semuanya sudah sesuai dengan rekomendasi berdasarkan bentuknya. Maka, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi tidak merubah pemakaian pupuk oleh petani. Sehingga secara keseluruhan semuanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Hampir di setiap daerah di Indonesia masih banyak petani dijumpai dengan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi sudah menjadi permasalahan yang sangat serius, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dalam kegiatan usaha taninya seperti yang terjadi di lokasi penelitian di Dusun VIII Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwasanya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut ada berbagai faktor penyebab yang terdapat didalamnya yaitu:

1. Usulan Pupuk Bersubsidi Sesuai e-RDKK Lebih Tinggi dari Realisasi

Pupuk bersubsidi yang diusulkan tidak sebanding dengan alokasi atau realisasi pupuk yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pupuk petani. . Jadi, salah satu yang menyebabkan tingkat realisasi pupuk subsidi rendah adalah karena adanya pengurangan jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Pengurangan jatah pupuk subsidi oleh pemerintah itu disebabkan oleh berkurangnya anggaran untuk pupuk bersubsidi dan juga pemberian pupuk bersubsidi yang dibagi dengan usaha pertanian dan perkebunan kelompok darat seperti perkebunan kelapa milik masyarakat.

2. Pola Distribusi Pupuk

Pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan keefektifannya sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan di lapangan kelompok tani maupun kios pengecer belum melaksanakan pendistribusian pupuk dengan efektif dikarenakan pembelian pupuk subsidi yang dilakukan petani tidak pada kios resmi yang sudah ditetapkan wilayah kerjanya. Banyaknya petani yang masih membeli pupuk pada kios pengecer bukan kepada distributor dikarenakan jarak antara tempat tinggal petani dengan kios resmi yang tergolong jauh sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih jika membeli di kios resmi, selain itu

terlambatnya ketersediaan pupuk subsidi di kios resmi menyebabkan petani lebih memilih membeli pada kios pengecer lainnya untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada tanaman padinya. Tentunya jika para petani membeli pupuk subsidi tidak pada kelompok taninya masing-masing atau tidak pada kios resmi sesuai wilayah kerjanya hal ini akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pupuk pada masing-masing kios pengecer lainnya. Secara singkat diketahui bahwasanya penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu kebijakan pupuk bersubsidi yang belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada pengecer resmi.

Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Salah satu tujuan program pupuk bersubsidi dari pemerintah adalah untuk membayar sebagian harga beli pupuk petani, sehingga dapat dijangkau oleh petani. Namun pada kenyataannya keberadaan pupuk bersubsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani. Akibatnya petani membeli pupuk yang bukan berasal dari program pemerintah atau pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Keberadaan pupuk bersubsidi dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan usaha taninya. Karena petani di Dusun VIII Desa Pematang Setrak yang memiliki keterbatasan modal tentunya akan lebih cenderung memilih menggunakan pupuk bersubsidi dengan harga yang masih bisa dijangkau meskipun pupuk bersubsidi dalam pendistribusian mengalami keterlambatan. Selain itu perbandingan biaya yang dikeluarkan petani pengguna pupuk bersubsidi dan nonsubsidi.

Tabel 1. Perbandingan Harga Pupuk Bersubsidi Dengan Non Subsidi

Jenis Pupuk	Harga Beli Pupuk Bersubsidi (Rp/50kg)	Harga Beli Pupuk Nonsubsidi (Rp/50kg)
Urea	Rp. 150.000	Rp. 500.000
Phonska	Rp. 150.000	Rp. 400.000

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan kepada narasumber diketahui dan dapat disimpulkan bahwasanya kelangkaan pupuk bersubsidi di lokasi penelitian tepatnya di Dusun VIII Desa Pematang Setrak merupakan ancaman bagi petani. Hal itu karena berdampak pada turunnya keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh petani. Ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, maka para petani akan beralih pada pupuk non subsidi yang sangat mahal, sehingga para petani akan memperoleh modal yang cukup banyak untuk biaya pupuk. Bagi para petani yang tidak memiliki modal cukup harus dapat berinisiatif sendiri untuk menggunakan pupuk kandang sebagai pengganti dari pupuk kimia atau pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Namun penggunaan pupuk kandang memiliki beberapa kekurangan seperti pengolahannya yang membutuhkan waktu yang lama, proses penyerapan nutrisi dari tanaman yang lambat dan jumlah ketersediaan unsur hara dalam pupuk subsidi tidak semuanya dapat dipenuhi atau digantikan dengan pupuk kandang.

Kebijakan Subsidi Pupuk

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1969. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan sektor pertanian sebagai sektor yang menggunakan tenaga kerja terbesar. Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Atas dasar program pemerintah melalui surat Keputusan Menperdag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003, tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam program tersebut pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan rakyat. Setiap program pemerintah tidak terlepas dari kendala dan masalah, terutama penyimpangan-penyimpangan dalam proses pencapaiannya, termasuk pupuk bersubsidi. Sehingga perlu dilakukannya koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai koordinator yang bertanggungjawab dalam pengurusan pupuk bersubsidi dan mengatur alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan untuk semua subsektor. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer dan kelompok tani yang telah ditunjuk wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani akan dilakukan oleh pengecer resmi di masing-masing kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Salah satu tujuan kebijakan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan. Alur distribusi pupuk bersubsidi telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dimana agar pupuk bersubsidi yang diperoleh petani dapat memenuhi prinsip enam tepat (tepat tempat, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga) serta efektivitasnya dalam sistem pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut.

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Terdapat beberapa perubahan kebijakan yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas, terutama para petani. Diantaranya, komoditas yang disubsidi sebelumnya berjumlah lebih dari 60 jenis, sedangkan Permentan No. 10 Tahun 2022 kini mengatur penyaluran pupuk bersubsidi diprioritaskan pada 9 komoditas utama berdasarkan kebutuhan pangan pokok negara. Sembilan komoditas utama yang dimaksud adalah Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha per petani. Begitu pula perubahan pada jumlah jenis pupuk bersubsidi yang semula terdapat 6 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik, dan Pupuk Organik Cair, berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK. Urea dan NPK dipertimbangkan sebagai pupuk yang mengandung unsur hara makro esensial yang harus selalu tersedia karena berfungsi dalam proses metabolisme dan biokimia sel tanaman.

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 merupakan langkah strategis Pemerintah yang diambil untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Langkah dan kebijakan ini juga diambil agar produk hasil pertanian Indonesia terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga.

Upaya Mengatasi Tata Kelola Pupuk Subsidi

Pemerintah juga melakukan upaya untuk memperbaiki Tata Kelola Pupuk Bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penyesuaian pupuk bersubsidi, serta penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran. Mekanisme pengurusan alokasi pupuk bersubsidi akan dilakukan dengan menggunakan data spasial dan/atau data luas lahan dalam Simluhtan, dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B). Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih akurat dan tepat sasaran. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu;

- a) Data spasial lahan milik petani;
- b) Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK; dan
- c) Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten.

Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten akan lebih dirinci berdasarkan kecamatan, jenis pupuk, jumlah, CPCL, serta sebaran bulanan. Para petani penerima pupuk bersubsidi harus merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) dan e-alokasi, serta memiliki kartu tani yang dapat digunakan untuk membeli pupuk subsidi di kios-kios tersedia.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendukung dan memperbaiki tata kelola Program Pupuk Bersubsidi dalam pembangunan ekonomi di sektor Pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pembentukan pola pemberdayaan pertanian juga sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok di dalam negeri. Maka dari itu kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. Di sisi lain, diperlukan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang memang didesain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.

KESIMPULAN

Penyebab dari kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi disebabkan oleh karena terjadinya ketidaksesuaian antara permintaan/usulan dari para petani terhadap pupuk bersubsidi dengan realisasi yang dilakukan atau diberikan oleh pihak pemerintah. Selain itu, penyebab dari kelangkaan pupuk bersubsidi adalah mengenai kebijakan pola distribusi yaitu keterlambatan dari pendistribusian pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani sehingga masih banyak ditemukan petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada pengecer resmi.

Kelangkaan pupuk bersubsidi di petani padi memberikan dampak pada turunnya keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh petani. Ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, maka para petani akan beralih pada pupuk non subsidi yang sangat mahal, sehingga para petani akan memperoleh modal yang cukup banyak untuk biaya pupuk. Bagi para petani yang tidak memiliki modal cukup harus dapat berinisiatif sendiri untuk menggunakan pupuk kandang sebagai pengganti dari pupuk kimia atau pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Namun penggunaan pupuk kandang memiliki beberapa kekurangan seperti pengolahannya yang membutuhkan waktu yang lama, proses penyerapan nutrisi dari tanaman yang lambat dan jumlah ketersediaan unsur hara dalam pupuk subsidi tidak semuanya dapat dipenuhi atau digantikan dengan pupuk kandang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada para petani padi yang memberikan waktunya untuk dilakukannya wawancara dalam hal mengumpulkan data pada penelitian kali ini, serta terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Dusun VIII Desa Pematang Setrak yang sudah ikut membantu terlaksananya penelitian ini sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Putri, P. M., Alifah, W., Gunawan, I., & . S. (2019). Analisis Jaringan Syaraf Tiruan Metode Backpropagation Dalam Memprediksi Ketersediaan Komoditas Beras Berdasarkan Provinsi Di Indonesia. *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.31598/jurnalresistor.v2i1.348>
- Ayu, I. W., Wijayanti, N., Rahayu, S., & Usman. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(4), 1597–1608.
- Dalimunthe, L. S., Humaizi, H., & Kadir, A. (2021). Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(2), 664–677. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059>
- Erwin Indra Prasetyo, & Usman, I. (2023). Optimalisasi Jumlah dan Lokasi Gudang Distribusi Pupuk Bersubsidi di Jawa Timur Akibat Perubahan Regulasi Pemerintah. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 6(1), 105–121. <https://doi.org/10.15642/manova.v6i1.1176>

- Gama, I. G. M., Oktaviani, R., & Rifin, A. (2016). Analisis Kepuasan Petani terhadap Penggunaan Pupuk Organik pada Tanaman Padi. *Jurnal Agro Ekonomi*, 34(2), 105–122.
- Indriasari, D. P., & Sani, A. (2019). Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.37476/massaro.v1i1.642>
- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), 97–107.
- Larasati, A., Antoni, M., & Lifianthi, L. (2022). Penggunaan pupuk subsidi dalam menekan biaya produksi dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani di kecamatan Tanjung Lago. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4463–4471. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1690>
- Maman, U., Aminudin, I., & Novriana, E. (2021). Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(2), 176. <https://doi.org/10.33512/jat.v14i2.13268>
- Noviandi, Y., Tanjung, A., Lubis, Y., & Lubis, S. (2020). Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan Harga Pupuk Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Batubara Study of Subsidized Fertilizer Availability and Price of Fertilizer on Paddy Production in Batubara Distr. *AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2(2), 208–216.
- Prasaktiyoga Adiraputra, D. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 12–26.
- Putu, N., Hasinu, M., Aromatica, D., Putera, R. E., Publik, A., & Andalas, U. (2021). Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kota padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 85–100.
- Ramlayana, R., Ansyari, I., & Sudarmi, S. (2020). Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 950–962. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3764/3020>
- Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 1(3), 75–83. <https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184>
- Sakharina, I. K., Noor, S. M., Daud, A. A., Widayanti, T., Pratama, W., & Mutaallif, S. (2021). Ketahanan Pangan Dan Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia. *Hermeneutika*, 5(2), 163–169. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>
- Saputra, A. D., & Eka Radiah, M. (2022). Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi pada Tingkat Petani Padi Sawah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Frontier Agribisnis*, 6(4), 216–223. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag>
- Setiawan Abdillah, W., Riki, & Abdal. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 121–134.
- Sugiono, S., & Faridatul Gufroniah, S. (2022). Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 371–385. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 271–283. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.271>